

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dan desentralisasi yang efektif berlaku sejak tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah secara langsung dirasakan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Setiap daerah diuntut untuk dapat mencari sumber pembiayaan bagi pembangunan daerahnya. Salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya yaitu dengan adanya sumber-sumber penerimaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dalam menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi dituntut untuk mampu mengelola keuangannya sendiri. Pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari keuangan di masing-masing daerah Kab/Kota. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 dan dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan sehingga penerimaan pemerintah daerah dapat disimak dalam UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. (Muluk, Khairul M.R, 2005: 146).

Belanja Pemerintah baik pusat maupun daerah sama-sama berperan dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal pengangguran, peran pusat dan daerah kurang lebih terlihat seimbang. Sedangkan dalam hal kemiskinan, tampak bahwa peran pusat lebih besar dari daerah. Hal ini berarti bahwa anggaran program penanggulangan kemiskinan secara skala lebih besar di tingkat Pemerintah Pusat dibanding Pemerintah Daerah. Kemungkinan lainnya, program penanggulangan kemiskinan di daerah belum memiliki tingkat efektivitas seperti program yang dilakukan di tingkat Pemerintah Pusat. Secara kumulatif, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah terlihat lebih berpengaruh terhadap kemiskinan daripada pengangguran. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan fokus Pemerintah secara keseluruhan yang memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dibanding pengangguran.

Hakikat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah adalah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, sehingga setiap belanja dalam program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD harus bertumpu pada hal tersebut. Belanja Daerah merupakan bagian utama dalam APBD yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah pengeluaran pemerintah daerah (belanja) di kelompokkan menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung maupun belanja

tidak langsung merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah melalui alokasi belanjanya. Alokasi belanja yang baik tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah Jawa Barat dalam menjalankan kebijakan anggarannya tentunya tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada tentang pengelolaan keuangan daerah. Baik mulai dari proses perencanaan program dan kegiatan bahkan sampai pelaksanaan program kegiatan tetap berpedoman pada ketentuan yang ada serta berdasarkan juga potensi yang ada di Jawa Barat.

Tabel I- 1

Nilai Belanja Daerah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2017 (Miliar rupiah)

PROVINSI	BELANJA DAERAH		RATA-RATA
	2016	2017	
Jawa Timur	23.859.953.926.118	28.878.134.635.609	19%
Jawa Tengah	19.354.374.825.983	22.884.713.018.754	15%
Jawa Barat	27.621.964.467.242	32.706.749.485.377	21%
DKI Jakarta	47.128.810.245.854	51.066.081.379.887	35%
Banten	8.925.813.442.214	9.512.813.119.364	7%
DI Yogyakarta	3.847.962.965.847	4.920.626.776.619	3%
TOTAL	130.738.879.873.258	149.969.118.415.610	100%

Sumber : BPS Jabar, Kementerian Keuangan, dan data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa belanja daerah masing-masing provinsi di pulau jawa selama tahun 2016-2017 terus meningkat. Provinsi

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah belanja daerah terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan provinsi dengan jumlah belanja daerah terendah yaitu DI Yogyakarta. Begitu juga dilihat berdasarkan distribusinya terhadap total belanja daerah masing-masing Provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat masih tetap menjadi yang terbesar kedua setelah provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 21 persen dan yang terendah DI Yogyakarta sebesar 3 persen. Melihat hal tersebut tentunya sangatlah wajar, karena Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan DKI Jakarta

Dengan posisi Jawa Barat yang memiliki jumlah belanja daerah terbesar kedua setelah DKI Jakarta di Pulau Jawa maka seharusnya dibarengi dengan jumlah penduduk miskin yang terus berkurang, hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah di Jawa Barat memang bagi kesejahteraan rakyat. Dari data realisasi APBD 2011-2017 menunjukkan bahwa pada sub-sub belanja pegawai dan belanja bantuan sosial dimana sub bantuan sosial masih berada dibawah sub belanja pegawai. Hal ini dapat dilihat bahwa kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kemiskinan, walaupun pada dasarnya pemerintah sudah ada upaya perbaikan dalam menuntaskan kemiskinan di daerahnya namun apabila kita bandingkan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh dan alokasi belanja yang lain maka hal ini belumlah cukup sebagai realisasi program pengentasan kemiskinan karena berdasarkan data yang penulis telusuri bahwa masih ditemukannya jumlah belanja pegawai yang lebih besar daripada jumlah belanja untuk sektor bantuan sosial, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dan gemuknya birokrasi yang perlu diurus.

Adanya ketimpangan dari sejumlah daerah yang masih meningkat, hal ini dalam kasus di Cianjur, Garut, dan Cirebon pada tahun 2016 secara berturut-turut mengalami kenaikan sebesar 0,8, 0,4, dan 0,3. Secara jelas bahwa pada setiap daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, pada daerah Bekasi, Bogor dan Karawang yang menjadi daerah penyokong ibukota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkembang dibanding dengan daerah lain. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai pemecah solusi agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dengan alokasi belanja daerah yang merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Peningkatan kebijakan alokasi belanja daerah dengan melihat pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sehingga kesejahteraan masyarakat kan lebih baik.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di muka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Investasi, Ketimpangan, IPM dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2011-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap belanja daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2017 ?

2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap belanja daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap belanja daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2017 ?
4. Bagaimana pengaruh ketimpangan terhadap belanja daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap belanja daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2017.
2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap belanja daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2017.
3. Menganalisis pengaruh investasi terhadap belanja daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2017.
4. Menganalisis pengaruh ketimpangan terhadap belanja daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2017.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi pihak terkait khususnya pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam masalah perekonomian Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah informasi dan wawasan bagi para pembaca .
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai tambahan referensi atau bahan acuan serta perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Alat dan Model Analisis

Sesuai tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini menggunakan analisis panel data. Analisis panel data adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (*time series*) dengan data antar individu (*cross section*). Dalam data panel, unit cross section yang sama di survey dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003). Regresi dengan menggunakan data panel memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar *cross section* dan *time series*, diantaranya:

- 1) Data panel dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas dimana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.
- 2) Data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja.

3) Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Untuk variabel gini ratio, peneliti mengikuti model dari I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, dan Nyoman Yuliarmi yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif signifikan dengan Gini Ratio. Untuk variabel Jumlah penduduk miskin mengikuti model dari Teddy Desly Minggu, Veckie A, Rumate, Debby Ch. Rotinsulu yang menyatakan bahwa belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki hubungan negatif signifikan dengan jumlah penduduk miskin. Untuk variabel Investasi mengikuti model dari Erni Sari Siregar yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif signifikan terhadap investasi daerah. Untuk variabel IPM mengikuti model dari Nur Isa Pratowo yang menyatakan bahwa IPM memiliki hubungan positif signifikan terhadap belanja daerah.

Hubungan antar variabel secara fungsional dinyatakan sebagai berikut :

$$BD = f(GR, JPM, I, IPM)$$

Secara umum bentuk utama regresinya adalah :

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 GR_{it} - \beta_2 JPM_{it} + \beta_3 I_{it} + \beta_4 IPM_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

BD = Belanja daerah

GR = Gini Ratio

JPM = Jumlah Penduduk Miskin

I = Investasi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

ϵ_{it} = residual secara menyeluruh
 $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien penjelas masing-masing input nilai parameter Y / Belanja daerah

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, *World Bank*, publikasi dari penelitian terdahulu, buku, media internet dan jurnal. Data yang digunakan antara lain data defisit anggaran, utang luar negeri Indonesia, suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap dollar, ekspor dan impor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) Jawa Barat tahun 2011-2017.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang secara garis besarnya disusun sebagai berikut:

BAB I : LATAR BELAKANG MASALAH

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, antara lain pengertian dan teori terkait pokok

bahasan yang akan dijelaskan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode penelitian, serta teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan menjabarkan tentang deskripsi pengolahan data dengan menggunakan model *Regresi Data Panel*, pembahasan dan hasil analisis data serta intepretasi ekonomi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. Dalam hal ini juga berisi saran yang direkomendasikan kepada pihak terkait atas dasar temuan untuk dijadikan bahan referensi atau evaluasi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN